



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM. 76 TAHUN 2013**

TENTANG

**KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas tugas serta penyederhanaan rentang kendali pekerjaan pusat ke daerah di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu diberikan pelimpahan wewenang kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18./M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.**

Pasal 1

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perhubungan dalam berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan secara efisien dan efektif, kepada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan diberikan pelimpahan wewenang dan tugas untuk melaksanakan koordinasi di daerah.
- (2) Daftar Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- c. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- e. UPT di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## Pasal 3

Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang dilaksanakan dan dikeluarkan oleh Kantor Pusat Kementerian Perhubungan kepada UPT yang dikoordinasikan;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan di UPT yang dikoordinasikan;
- c. bertindak sebagai fasilitator sumber data dan informasi dari UPT yang dikoordinasikan;
- d. mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan anggaran;
- e. membantu pengkoordinasian penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian di UPT yang dikoordinasikan;
- f. membantu pengkoordinasian penyiapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di UPT yang dikoordinasikan;
- g. melakukan konsultasi dan memberi pertimbangan atau rekomendasi kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal, untuk penanganan permasalahan khusus pada UPT yang dikoordinasikan;
- h. melaporkan kegiatan dan hasil pengkoordinasian, pengawasan, penilaian yang telah dilakukan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

## Pasal 4

Wewenang dan tugas yang diberikan kepada Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tugas tambahan sebagai Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 5

Untuk membantu pelaksanaan Administrasi, Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan dapat mengangkat Sekretaris yang berfungsi sebagai kesekretariatan Koordinator Wilayah Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2013

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**E. E. MANGINDAAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 September 2013

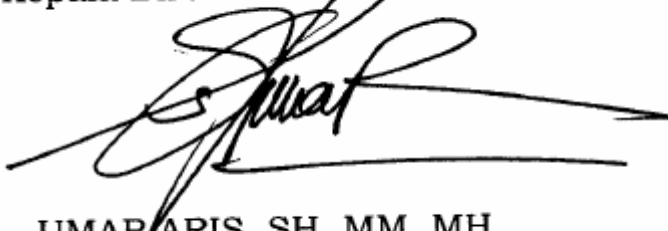
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1144**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PM.76 TAHUN 2013  
Tanggal : 17 SEPTEMBER 2013  
-----

**DAFTAR KOORDINATOR WILAYAH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	KOORDINATOR WILAYAH	UPT YANG DIKOORDINASIKAN	PROVINSI
1.	<b>Disnav Kelas II Sabang</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KSOP Kelas III Lhokseumawe</li> <li>2) KSOP Kelas IV Malahayati</li> <li>3) KSOP Kelas V Sabang</li> <li>4) KSOP Kelas V Meulaboh</li> <li>5) KSOP Kelas V Kuala Langsa</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Idi</li> <li>7) Kantor UPP Kelas III Tapak Tuan</li> <li>8) Kantor UPP Kelas III Singkil</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Sinabang</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Calang</li> <li>11) Kantor UPP Kelas III Susoh</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas III Cut Nyak Dhien, Meulaboh</li> <li>2) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas IV Lasikin, Sinabang</li> <li>3) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas IV Teuku Cut Ali, Tapak Tuan</li> </ol>	<b>Provinsi Nangroe Aceh Darusallam</b>
2.	<b>Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Medan</li> <li>2) KSOP Pangkalan Susu</li> <li>3) Kantor UPP Teluk Dalam</li> <li>4) Kantor UPP Sirombu</li> <li>5) Kantor UPP Lahewa</li> <li>6) Kantor UPP Pulau Tello</li> <li>7) Kantor UPP Pantai Cermin</li> <li>8) Kantor UPP Tanjung Beringin</li> <li>9) Kantor UPP Pangkalan Dodek</li> <li>10) Kantor UPP Tanjung Tiram</li> <li>11) Kantor UPP Leidong</li> <li>12) Kantor UPP Tanjung Sarang Elang</li> <li>13) Kantor UPP Sikara-Kara/Natal</li> <li>14) Kantor UPP Sei Berombong</li> <li>15) Kantor UPP Barus</li> <li>16) Kantor UPP Tanjung Pura</li> <li>17) Kantor UPP Pulau Kampai</li> </ol>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>

		<p>18) Disnav Kelas I Belawan 19) Disnav Kelas III Sibolga</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Kantor Otoritas Bandara Udara Kelas I Polonia 2) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas III Binaka, Gn. Sitoli 3) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas III Pinangsori, Sibolga 4) Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas III Aek Godang, Padang Sidempuan</p> <p><b>c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>- Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Medan</p>	
3.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Bayur</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Disnav Kelas II Teluk Bayur 2) Kantor UPP Kelas III Siuban 3) Kantor UPP Kelas III Muara Siberut 4) Kantor UPP Kelas III Sikakap</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Rokot, Sipora 2) Otoritas Bandar Udara Kelas II Minangkabau Padang</p>	<b>Provinsi Sumatera Barat,</b>
4.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Disnav Kelas I Dumai 2) KSOP Kelas III Pekanbaru 3) KSOP Kelas III Kuala Enok 4) KSOP Kelas III Sungai Pakning 5) KSOP Kelas IV Tembilahan 6) KSOP Kelas IV Rengat 7) KSOP Kelas V Bagan Siapi-api 8) KSOP Kelas V Bengkalis 9) KSOP Kelas V Selat Panjang 10) Kantor UPP Kelas III Kuala Gaung 11) Kantor UPP Kelas III Sinaboi 12) Kantor UPP Kelas III Tanjung Medai 13) Kantor UPP Kelas III Panipahan 14) Kantor UPP Kelas III Batu Panjang 15) Kantor UPP kelas III Sungai Gantung</p>	<b>Provinsi Riau</b>

5.	<b>Kantor Pelabuhan Batam</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang</li> <li>2) KSOP Kelas II Tanjung Pinang</li> <li>3) KSOP Kelas II Tanjung Balai Karimun</li> <li>4) KSOP Kelas II Kijang</li> <li>5) KSOP Kelas III Pulau Sambu</li> <li>6) Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban</li> <li>7) Kantor UPP Kelas II Dabo Singkep</li> <li>8) Kantor UPP Kelas II Tanjung Batu</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Pasir Panjang</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Senayang</li> <li>11) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Uban</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandar Udara Jenis A Kelas Utama Batam</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Japura, Rengat</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Seibati Tj. Balai Karimun</li> <li>4) Bandar Udara Jenis A Kelas III, Dabo Singkep</li> </ol>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>
6.	<b>Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas I Fatmawati Soekarno, Bengkulu</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pulau Baai</li> <li>2) Kantor UPP Kelas III Malakoni-Enggano</li> <li>3) Kantor UPP Kelas III Linau/Bintuhan</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandar Udara Jenis A Kelas IV Muko-Muko</li> </ul>	<b>Provinsi Bengkulu</b>
7.	<b>KSOP Kelas III Talang Dukuh</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai LLAJSDP Jambi</li> </ul> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KSOP Kelas V Muara Sabak</li> <li>2) KSOP Kelas V Kuala Tungkal</li> <li>3) Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang</li> <li>4) Kantor UPP Kelas III Kuala Mendahara</li> </ol>	<b>Provinsi Jambi</b>

		<p><b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Depati Parbo, Kerinci</p>	
8.	<b>Distrik Navigasi Kelas I Palembang</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Kelas II Palembang</p> <p>2) KSOP Kelas V Muntok</p> <p>3) Kantor UPP Kelas III Sungai Lumpur</p> <p><b>b. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>1) Balai PPTD Palembang</p> <p>2) Balai Diklat Penerbangan Palembang</p>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>
9.	<b>Kantor UPP Kelas I Manggar</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) KSOP Kelas IV Pangkal Palam</p> <p>2) KSOP Kelas V Tanjung Pandan</p> <p>3) Kantor UPP Kelas III Toboali</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>- Bandar Udara Jenis A Kelas II H.Asan Hanandjoedin Tanjung Pandan</p>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>
10.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) KSOP Kelas V Bakauheuni</p> <p>2) Kantor UPP Kelas III Menggala</p> <p>3) Kantor UPP Kelas III Kota Agung</p> <p>4) Kantor UPP Kelas III Labuhan Maringgai</p> <p>5) Kantor UPP Kelas III Mesuji</p> <p>6) Kantor UPP Kelas III Teluk Betung</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>- Bandar Udara Jenis A Kelas II Radin Inten II, Lampung</p>	<b>Provinsi Lampung</b>
11.	<b>Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <p>1) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan</p> <p>2) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak</p>	<b>Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten</b>



**b. Ditjen Perhubungan Laut**

- 1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
- 2) Disnav Kelas I Tanjung Priok
- 3) Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok
- 4) KSOP Kelas II Cirebon
- 5) KSOP kelas III Sunda Kelapa
- 6) KSOP Kelas V Marunda
- 7) KSOP Kelas V Kepulauan Seribu
- 8) KSOP Kelas V Kalibaru
- 9) KSOP Kelas V Muara Karang/Muara Angke
- 10) KSOP Kelas V Muara Baru
- 11) Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Ratu
- 12) Kantor UPP Kelas III Pangandaran
- 13) Kantor UPP Kelas III Pamanukan
- 14) Kantor UPP Kelas III Indramayu
- 15) Kantor UPP Kelas III Anyer Lor
- 16) Kantor UPP Kelas III Labuhan
- 17) Kantor UPP Kelas III Karangantu
- 18) Kantor UPP Kelas III Bojanegara

**c. Ditjen Perhubungan Udara**

- 1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
- 2) Balai Kesehatan Penerbangan
- 3) Balai Teknik Penerbangan
- 4) Otoritas Bandar Udara Kelas Utama Soekarno Hatta
- 5) Bandar Udara Jenis B Kelas I Budiarto
- 6) Bandar Udara Jenis A Kelas III Penggung, Cirebon

**d. Ditjen Perkeretaapian**

- Kantor Administrator Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung

**e. Badan Pengembangan SDM Perhubungan**

- 1) Balai Besar Pendidikan, Penyelidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)
- 3) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Curug
- 4) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Bekasi

		<p>5) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP), Mauk</p> <p>6) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL)</p>	
12.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Semarang</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) KSOP Kelas II Cilacap</li> <li>2) KSOP Kelas IV Tegal</li> <li>3) Disnav Kelas II Semarang</li> <li>4) Disnav Kelas III Cilacap</li> <li>5) Kantor UPP Kelas II Pekalongan</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Brebes</li> <li>7) Kantor UPP Kelas III Jepara</li> <li>8) Kantor UPP Kelas III Pati</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Rembang</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Batang</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandar Udara Jenis A Kelas III Tunggul Wulung, Cilacap</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Dewa Daru Karimun Jawa</li> </ol> <p><b>c. Ditjen Perkeretaapian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Administrator Terminal Peti Kemas Jebres Solo</li> </ul> <p><b>d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang</li> <li>2) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal</li> </ol>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>
13.	<b>Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor OP Utama Tanjung Perak</li> <li>2) Disnav Kelas I Surabaya</li> <li>3) Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak</li> <li>4) KSOP Kelas II Gresik</li> <li>5) KSOP Kelas III Banyuwangi</li> <li>6) KSOP Kelas IV Probolinggo</li> <li>7) KSOP Kelas V Pasuruan</li> <li>8) KSOP Kelas V Panarukan</li> <li>9) KSOP Kelas V Kalianget</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Bawean</li> <li>11) Kantor UPP Kelas III Telaga Biru</li> <li>12) Kantor UPP Kelas III Branta</li> <li>13) Kantor UPP Kelas III Sapudi</li> <li>14) Kantor UPP Kelas III Sapekan</li> <li>15) Kantor UPP Kelas III Kalbut</li> <li>16) Kantor UPP Kelas III Masalembo</li> </ol>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>

		<p>17) Kantor UPP Kelas III Brondong 18) Kantor UPP Kelas III Ketapang</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>- Otoritas Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya</p> <p><b>c. Ditjen Perkeretaapian</b></p> <p>- Kantor Administrator Terminal Peti Kemas Rambipuji Jember</p> <p><b>d. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>1) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya 2) Politeknik Pelayaran Surabaya</p>	
14.	<b>Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I Ngurah Rai Bali</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <p>1) Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk 2) Balai LLAJSDP Denpasar</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa 2) KSOP Kelas IV Padangbai 3) Disnav Kelas II Benoa 4) Kantor UPP Kelas III Nusa Penida 5) Kantor UPP Kelas III Gilimanuk 6) Kantor UPP kelas III Buleleng</p> <p><b>c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>- Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Gianyar</p>	<b>Provinsi Bali</b>
15.	<b>KSOP Kelas III Lembar</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <p>- Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) KSOP Kelas IV Bima 2) KSOP Kelas V Badas 3) Kantor UPP Kelas III Labuhan Lombok</p>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>

		<p>4) Kantor UPP Kelas III Sape  5) Kantor UPP Kelas III Calabahi  6) Kantor UPP Kelas III Benete  7) Kantor UPP Kelas III Pemenang /Tanjung</p> <p><b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas III M.Salahuddin Bima  2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Brangbiji Sumbawa Besar</p>	
16.	<b>Distrik Navigasi Kelas II Kupang</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <p>- Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Kalabahi</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) KSOP Kelas III Kupang/ Tenau  2) KSOP Kelas V Laurentius Say  3) KSOP Kelas V Kalabahi  4) KSOP Kelas V Waingapu  5) KSOP Kelas V Ende  6) Kantor UPP Kelas III Larantuka  7) Kantor UPP Kelas III Reo  8) Kantor UPP Kelas III Waikelo  9) Kantor UPP Kelas III Atapupu  10) Kantor UPP Kelas III Baranusa  11) Kantor UPP Kelas III Baa  12) Kantor UPP Kelas III Seba  13) Kantor UPP Kelas III Marapokot  14) Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo</p> <p><b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas III Wai Oti Maumere  2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Mau Hau Waingapu  3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Komodo Labuhan Bajo  4) Bandar Udara Jenis A Kelas III H.Hasan Aroeboesman Ende  5) Bandar Udara Jenis A Kelas III Satar Tacik Ruteng  6) Bandar Udara Jenis A Kelas III Tambolaka Waikabubak  7) Bandar Udara Jenis A Kelas III Mali Alor  8) Bandar Udara Jenis A Kelas III Gewayantana Larantuka  9) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Haliwen Atambua  10) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Lekunik Rote  11) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Tardamu Sabu</p>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>

		<p>12) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Soa Bajawa</p> <p>13) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Wonopito Lewoleba</p>	
17.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) KSOP Kelas V Teluk Air 2) KSOP Kelas V Sintete 3) KSOP Kelas V Ketapang 4) Kantor UPP Kelas III Paloh/Sakura 5) Kantor UPP Kelas III Teluk Melano 6) Kantor UPP Kelas III Kendawangan 7) Disnav Kelas III Pontianak</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas III Rahadi Oesman Ketapang 2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Susilo Sintang 3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Pangsuma Putusibau 4) Bandar Udara Jenis A Kelas III Nangapinoh</p>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>
18.	<b>Bandar Udara Jenis A Kelas I Tjilik Riwut I</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <p>- Balai LLAJSDP Palangkaraya</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit 2) KSOP Kelas V Kuala Pembuang 3) KSOP Kelas V Samuda 4) KSOP Kelas V Pulang Pisau 5) KSOP Kelas V Pangkalan Bun 6) KSOP Kelas V Sukamara 7) KSOP Kelas V Pengatan Mendawai 8) Kantor UPP Kelas III Kereng Bengkirai</p> <p><b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas II Iskandar Pangkalan Bun 2) Bandar Udara Jenis A Kelas II H.Asan Sampit 3) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kuala Pembuang Kota Waringin Timur 4) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Tumbang Samba</p>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>

		5) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kuala Kurun	
19.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Disnav Kelas II Banjarmasin</li> <li>2) KSOP Kelas IV Kotabaru</li> <li>3) Kantor UPP Kelas III Sei Danau</li> <li>4) Kantor UPP Kelas III Tanjung Batu</li> <li>5) Kantor UPP Kelas III Sebuku</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Kintap</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandar Udara Jenis A Kelas III Stagen Kotabaru</li> </ul>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>
20.	<b>Disnav Kelas I Samarinda</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Kariangau</li> </ul> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan</li> <li>2) KSOP Kelas II Samarinda</li> <li>3) KSOP Kelas III Tarakan</li> <li>4) KSOP Kelas IV Nunukan</li> <li>5) Kantor UPP Kelas I Tanjung Laut</li> <li>6) Kantor UPP Kelas I Lhok Tuan</li> <li>7) Kantor UPP Kelas II Tanah Grogot</li> <li>8) Kantor UPP Kelas II Tanjung Santan</li> <li>9) Kantor UPP Kelas II Sangatta</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Sangkulirang</li> <li>11) Kantor UPP Kelas III Tanjung Selor</li> <li>12) Kantor UPP Kelas III Sungai Nyamuk</li> <li>13) Kantor UPP Kelas III Tanjung Redep</li> <li>14) Kantor UPP Kelas III Pulau Bunyu</li> <li>15) Kantor UPP Kelas III Kuala Semboja/Sebulu</li> </ol> <p><b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otoritas Bandar Udara Kelas II Sepinggian Balikpapan</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas I Khusus Juwata Tarakan</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Nunukan</li> <li>4) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Yuvai Semaring Long Bawang</li> <li>5) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Tanjung Harapan Tanjung Selor</li> <li>6) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Long Apung</li> </ol>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Detah Dawai</li> <li>8) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Melak</li> </ul>	
21.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Bitung</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Disnav Kelas I Bitung</li> <li>2) Pangkalan PLP Kelas II Bitung</li> <li>3) KSOP Kelas III Manado</li> <li>4) Kantor UPP Kelas II Tahuna</li> <li>5) Kantor UPP Kelas III Lirung</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Ulu Siau</li> <li>7) Kantor UPP Kelas III Belang</li> <li>8) Kantor UPP Kelas III Kotabunan</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Labuhan Uki</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Likupang</li> </ul> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Otoritas Bandar Udara Kelas II Sam Ratulangi Manado</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Naha Tahuna</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Melongguane Sangir Talaud</li> </ul>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>
22.	<b>Bandar Udara Jenis A Kelas II Djalaludin Gorontalo</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) KSOP Kelas IV Gorontalo</li> <li>2) Kantor UPP Kelas III Kwandang Limboto</li> <li>3) Kantor UPP Kelas III Tilamuta Limboto</li> <li>4) Kantor UPP Kelas III Anggrek Limboto</li> </ul> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Gorontalo</li> </ul>	<b>Provinsi Gorontalo</b>
23.	<b>Kantor Bandar Udara Jenis A Kelas I Palu</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Pagimana Balai LLAJSDP Palu</li> </ul> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Pantoloan</li> <li>2) KSOP Kelas IV Toli Toli</li> <li>3) Kantor UPP Kelas II Poso</li> <li>4) Kantor UPP Kelas II Palopo</li> <li>5) Kantor UPP Kelas III Leok</li> </ul>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>

		6) Kantor UPP Kelas III Ogoamas 7) Kantor UPP Kelas III Parigi 8) Kantor UPP Kelas III Moutong 9) Kantor UPP Kelas III Ampana 10) Kantor UPP Kelas III Bunta 11) Kantor UPP Kelas III Pagimana 12) Kantor UPP Kelas III Banggai 13) Kantor UPP Kelas III Kolonedale 14) Kantor UPP Kelas III Luwuk 15) Kantor UPP Kelas III Wani  <b>c. Ditjen Perhubungan Udara</b>  1) Bandar Udara Jenis A Kelas III Bubung Luwuk 2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Lalos Toli-Toli 3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Kasiguncu Poso	
24.	<b>Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar</b>	<b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b>  1) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar 2) Disnav Kelas I Makassar 3) KSOP Kelas III Pare Pare 4) Kantor UPP Kelas II Palopo 5) Kantor UPP Kelas III Mamuju 6) Kantor UPP Kelas III Majene 7) Kantor UPP Kelas III Malili 8) Kantor UPP Kelas III Polewali 9) Kantor UPP Kelas III Awarange/Barru 10) Kantor UPP Kelas III Bulukumba 11) Kantor UPP Kelas III Jenepono 12) Kantor UPP Kelas III Selayar 13) Kantor UPP Kelas III Jampea 14) Kantor UPP Kelas III Sinjai 15) Kantor UPP Kelas III Belang- Belang 16) Kantor UPP Kelas III Bajoe 17) Kantor UPP Kelas III Siwa 18) Kantor UPP Kelas III Pattirobajo 19) Kantor UPP Kelas III Biringkasi  <b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b>  1) Otoritas Bandar Udara Kelas I Hasanuddin Makassar 2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Pongtiku Tana Toraja 3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Andi Jemma Masamba	<b>Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat</b>



		<p>4) Bandar Udara Jenis A Kelas IV H.Aeropala Selayar</p> <p>5) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Tamba Padang, Mamuju</p> <p><b>c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong</p> <p>2) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar</p> <p>3) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar</p>	
25.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Kantor UPP Kelas I Bau-Bau</p> <p>2) Kantor UPP Kelas Kelas II Pomala</p> <p>3) Kantor UPP Kelas III Raha</p> <p>4) Kantor UPP kelas III Kolaka</p> <p>5) Kantor UPP Kelas III Langara</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas II Wolter Monginsidi Kendari</p> <p>2) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Beto Ambari Bau Bau</p> <p>3) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Sugimanuru Raha</p>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>
26.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Disnav Kelas I Ambon</p> <p>2) Pangkalan PLP Kelas II Tual</p> <p>3) Kantor UPP Kelas II Namlea</p> <p>4) Kantor UPP Kelas II Tulehu</p> <p>5) Kantor UPP Kelas II Tual</p> <p>6) Kantor UPP Kelas II Saumlaki</p> <p>7) Kantor UPP Kelas II Dobo</p> <p>8) Kantor UPP Kelas III Amahai</p> <p>9) Kantor UPP Kelas III Geser</p> <p>10) Kantor UPP Kelas III Leksula</p> <p>11) Kantor UPP Kelas III Wonreli</p> <p>12) Kantor UPP Kelas III Wahai</p> <p>13) Kantor UPP Kelas III Waisarisa</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <p>1) Bandar Udara Jenis A Kelas III Dumatubun Maluku</p> <p>2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Bandaneira Kep. Banda</p> <p>3) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Olilit Saumlaki</p>	<b>Provinsi Maluku</b>

27.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor UPP Kelas II Tobelo</li> <li>2) Kantor UPP Kelas II Sanana</li> <li>3) Kantor UPP Kelas II Labuha Babang</li> <li>4) Kantor UPP Kelas III Laiwui</li> <li>5) Kantor UPP Kelas III Soasio</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Jailolo</li> <li>7) Kantor UPP Kelas III Daruba</li> <li>8) Kantor UPP Kelas III Buli</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Gebe</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandar Udara Jenis A Kelas II Sultan Babullah Ternate</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Kuabang Kao</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Gamar Malamo Galela</li> <li>4) Bandar Udara Jenis A Kelas III Oesman Sadik Labuha</li> </ol>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>
28.	<b>Bandar Udara Jenis A Kelas I Khusus Sentani Jayapura</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura</li> <li>2) Disnav Kelas II Jayapura</li> <li>3) Disnav Kelas III Merauke</li> <li>4) KSOP Kelas II Biak</li> <li>5) KSOP Kelas IV Merauke</li> <li>6) Kantor UPP Kelas III Serui</li> <li>7) Kantor UPP Kelas III Waren</li> <li>8) Kantor UPP Kelas III Nabire</li> <li>9) Kantor UPP Kelas III Kaimana</li> <li>10) Kantor UPP Kelas III Sarmi</li> </ol> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otoritas Bandara Kelas II Rendani Manokwari</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas I Mopah Merauke</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas II Wamena</li> <li>4) Bandar Udara Jenis A Kelas II Nabire</li> <li>5) Bandar Udara Jenis A Kelas III Enarotali</li> <li>6) Bandar Udara Jenis A Kelas III Waghete</li> <li>7) Bandar Udara Jenis A Kelas III Mararena Sarmi Jayapura</li> <li>8) Bandar Udara Jenis A Kelas III Tanah Merah Merauke</li> <li>9) Bandar Udara Jenis A Kelas III Mulia</li> <li>10) Bandar Udara Jenis A Kelas III Sudjarwo Tjondronegoro Serui</li> <li>11) Bandar Udara Jenis A Kelas III Oksibil</li> </ol>	<b>Provinsi Papua</b>

		<p>12) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Waris</p> <p>13) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Dabra</p> <p>14) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Senggeh</p> <p>15) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Mindiptanah</p> <p>16) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kepi</p> <p>17) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kokonao</p> <p>18) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Bokondini</p> <p>19) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Okaba</p> <p>20) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Numfor</p> <p>21) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Ilaga</p> <p>22) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Illu</p> <p>23) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Tiom</p> <p>24) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Ewer</p> <p>25) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Batom</p> <p>26) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Bade</p> <p>27) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Lereh</p> <p>28) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Karubaga</p> <p>29) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Obano</p> <p><b>c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <p>- Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura</p>	
29.	<b>Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Sorong</b>	<p><b>a. Ditjen Perhubungan Laut</b></p> <p>1) Disnav Kelas I Sorong</p> <p>2) KSOP Kelas IV Manokwari</p> <p>3) KSOP Kelas V Fak-Fak</p> <p>4) Kantor UPP Kelas II Amamapare</p> <p>5) Kantor UPP Kelas III Korido</p> <p>6) Kantor UPP Kelas III Oransbari</p> <p>7) Kantor UPP Kelas III Wasior</p> <p>8) Kantor UPP Kelas III Taminibuan</p> <p>9) Kantor UPP Kelas III Saunek</p> <p>10) Kantor UPP Kelas III Kokas</p> <p>11) Kantor UPP Kelas III Pomako</p> <p>12) Kantor UPP Kelas III Agats</p>	<b>Provinsi Papua Barat</b>

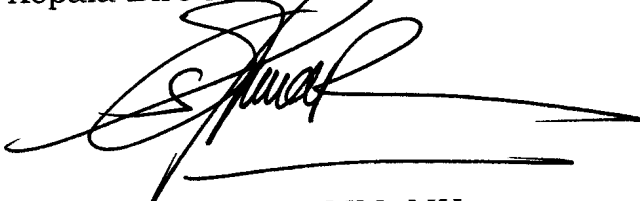
		<p>13) Kantor UPP Kelas III Bade 14) Kantor UPP Kelas III Bintuni</p> <p><b>b. Ditjen Perhubungan Udara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bandar Udara Jenis A Kelas II Domine Eduard Osok</li> <li>2) Bandar Udara Jenis A Kelas III Torea Fak Fak</li> <li>3) Bandar Udara Jenis A Kelas III Rendani Manokwari</li> <li>4) Bandar Udara Jenis A Kelas III Utarom Kaimana</li> <li>5) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Bintuni</li> <li>6) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Ijahabra Merdei</li> <li>7) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Wasiar Teluk Womdana</li> <li>8) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Inanwatan</li> <li>9) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Teminabuan</li> <li>10) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Babo</li> <li>11) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kambuaya</li> <li>12) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Kebiar</li> <li>13) Bandar Udara Jenis A Kelas IV Ayawasi</li> </ol> <p><b>c. Badan Pengembangan SDM Perhubungan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong.</li> </ul>	
--	--	--	--

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**E. E. MANGINDAAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001